

## BAB IX KESIMPULAN DAN SARAN

### 9.1. Kesimpulan

Pembangunan infrastruktur di Kepulauan Sumenep Madura menghadapi masalah lingkaran keterbatasan infrastruktur yang terus berputar, yaitu keterbatasan infrastruktur yang menyebabkan dan disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur. Hal tersebut disebabkan oleh lokasi kepulauan yang terpencil dan *moral hazard stakeholder* (pemerintah, swasta, dan masyarakat), serta fungsi infrastruktur sebagai *social overhead capital*, yang memfasilitasi berfungsinya infrastruktur yang lain.

Dengan lokasi kepulauan yang terpencil, keterbatasan transportasi laut berimplikasi pada terhambatnya mobilitas orang dan barang antar pulau yang berfungsi memfasilitasi penyediaan dan berfungsinya berbagai infrastruktur yang lain. Sementara itu, pada proses pembangunan infrastruktur di Kepulauan yang terpencil, para pelaku (pemerintah, swasta, dan masyarakat) ketika berperan sebagai *agent* cenderung melakukan *moral hazard* dalam berbagai bentuk hingga menimbulkan terjadinya *tragedy of the commons* yang merugikan semua pihak.

Semua permasalahan tersebut menyebabkan pemerintah dan swasta tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik, khususnya pada penyediaan infrastruktur di Kepulauan Sumenep yang terpencil. Kondisi tersebut telah mendorong berfungsinya modal sosial masyarakat lokal (kearifan lokal) untuk memfasilitasi tindakan kolektif *gotong royong* pada penyediaan infrastruktur secara mandiri. Modal sosial tersebut bersumber dari norma agama (Islam) dan norma budaya (Suku Bugis dan Madura) yang mempunyai hubungan kekerabatan dan daya kerjasama yang tinggi.

## 9.2.Saran

Adanya masalah lingkaran keterbatasan infrastruktur yang terus berputar di Kepulauan Sumenep Madura yang disebabkan oleh masalah lokasi yang terpencil dan *moral hazard stakeholder* (pemerintah, swasta dan masyarakat) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur seharusnya didasari oleh komitmen moral semua *stakeholder* dengan pola pembangunan terpadu dan berkelanjutan, dengan melibatkan semua pihak terkait.

Dengan komitmen moral yang baik (rasional *simpatic/altruistic*), diharapkan semua *stakeholder* ketika berperan sebagai *principal* maupun *agent* mempunyai kesadaran yang tinggi untuk tidak menyimpang. Sehingga diharapkan tidak ada lagi ego sektoral antar instansi terkait, pembangunan infrastruktur yang tumpang tindih (*overlapping*) antar instansi terkait, inefisiensi anggaran, dan ketidakmerataan pembangunan. Selain itu, masyarakat juga diharapkan mempunyai kesadaran untuk aktif dalam penyediaan dan penggunaan infrastruktur. Sehingga pembangunan infrastruktur dapat memenuhi kebutuhan masyarakat kepulauan hingga di lokasi yang paling terpencil.

Kearifan lokal berupa tindakan kolektif *gotong royong* yang difasilitasi oleh modal sosial masyarakat selama ini terbukti mampu menjadi solusi yang efektif untuk penyediaan infrastruktur di desa-desa terpencil yang tidak dapat disediakan oleh pemerintah dan swasta. Keberhasilan dan keberlanjutan tindakan kolektif *gotong royong* tersebut seharusnya didukung dan difasilitasi oleh pemerintah selaku lembaga formal. Adanya kerjasama dan interaksi timbal balik antara kelembagaan formal dan informal diharapkan akan memperkuat modal sosial untuk memfasilitasi keberhasilan dan keberlanjutan tindakan kolektif *gotong royong* masyarakat pada pembangunan infrastruktur di kepulauan yang terpencil.